

TESIS
PENGUASAAN TANAH SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH
OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh
IMELDA HARDI
NIM. 2120113042

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum. (Ketua Pembimbing)

Dr. Hengki Andora, S.H.,LL.M. (Anggota Pembimbing)

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023

**PENGUASAAN TANAH SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH
OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG**

**(Imelda Hardi, 21 20113 042, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas)**

ABSTRAK

Tanah begitu penting bagi kehidupan manusia, untuk itulah Negara mengatur hal ini di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk menerapkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menganut prinsip Negara “menguasai” dan bukan “memiliki”. Bahwa kedudukan Negara hanya sebatas penerima kuasa dari rakyat dan hanya berfungsi sebagai petugas bangsa yang menyelenggarakan penguasaan tanah berdasarkan konsep hak menguasai dari Negara. Oleh karena itu, Negara tidak berkedudukan sebagai pemilik (*eigenaar*). Pemilik atas tanah adalah rakyat yang didesain mempunyai hubungan hukum yang kuat dan penuh atas tanah. Atas dasar itu, di dalam Hukum Pertanahan, instansi pemerintah tidak dimungkinkan mempunyai Hak Milik. Jika instansi pemerintah memerlukan tanah, hak penguasaan yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah hanya dimungkinkan ke dalam dua jenis, yaitu Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Sementara itu, persoalan pendaftaran tanah juga merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam pengelolaan aset tanah Pemerintah. Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tesis ini fokus pada; 1) penguasaan dan pengelolaan Tanah Pemerintah oleh Pemerintah Daerah, 2) penguasaan Tanah Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Kota Padang, serta 3) penguasaan dan pengamanan Tanah Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan kepastian hukum dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, empiris dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari regulasi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset tanah serta hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tanah Pemerintah Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan aset tanah oleh Pemerintah Kota Padang oleh OPD pengguna tanah. Selanjutnya, 3 (tiga) upaya pengamanan aset tanah harus dilaksanakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, agar terwujud kepastian hukum aset tanah Pemerintah Kota Padang yang dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Kata kunci: Tanah Pemerintah, Aset Tanah, Barang Milik Daerah.

**LAND TENURE AS REGIONAL PROPERTY
BY THE GOVERNMENT OF PADANG**

**(Imelda Hardi, 21 20113 042, Magister of Law, Faculty of Law,
Andalas University)**

ABSTRACT

Land is so important for human life, for this reason the State regulates this matter in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "Earth, water and the natural resources contained therein are controlled by the State and used for the maximum the great prosperity of the people." To implement Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) was promulgated. UUPA adheres to the principle of the State "controlling" and not "owning". Whereas the position of the State is only limited to the recipient of power from the people and only functions as an officer of the nation who organizes land tenure based on the concept of the right to control from the State. Therefore, the State is not domiciled as the owner (eigenaar). Owners of land are people who are designed to have strong and full legal relations with land. On that basis, in the Land Law, it is not possible for government agencies to have property rights. If government agencies need land, tenure rights that can be granted to government agencies are only possible into two types, namely usage rights and management rights. Meanwhile, the issue of land registration is also an important activity to be carried out in the management of government land assets. Regional assets or property are one of the important elements in the framework of administering government and serving the community. This thesis focuses on the control and management of Regional Government Land by the Government of Padang, as well as the control and management of Regional Government Land which can create legal certainty and provide maximum benefits. The research method in this study uses a normative juridical, empirical and conceptual approach. The data sources used are derived from regulations, documents relating to the management of land assets and the results of interviews with the parties involved in the management of Regional Property in the form of Padang Government's land. Based on the research that has been done, it is concluded that the implementation of management of local government land assets has been carried out by the Government of Padang in accordance with the regulations governing the management of regional property. However, there are several obstacles that cause the management of land assets by the Government of Padang by the OPD of land users to be less than optimal. Furthermore, 3 (three) efforts to secure land assets must be carried out as an inseparable unit, so that legal certainty for the Government of Padang's land assets can be realized which can provide the maximum benefit.

Keywords: Government Land, Land Assets, Regional Property.